

INTELEGENSIA ISLAM SEBAGAI SEBUAH KELAS SOSIAL BARU

Ahmad Calam^{#1}, Denny Susanti^{*2}, Tohar Bayu Angin^{*3}

[#] Program Studi Komputer, STMIK Triguna Dharma

Jl. A.H. Nasution No. 73 F - Medan

¹ahmadcalam@ymail.com

^{*} Kementrian Agama Sumatera Utara

Jl. Gatot Subroto No. 91 Medan

Abstrak

Gambaran mengenai Intelegensia Islam Indonesia mengalami pasang surut, baik secara politis maupun intelektual. Transformasi Intelegensia Islam Indonesia yang semula termarginalkan dari dunia intelektual, politik dan birokrasi Indonesia menuju posisi sentral merupakan gambaran dari perjalanan panjang Intelegensia Islam Indonesia. Kemunculan Intelegensia Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga dua decade pertama abad ke-20, termanipulasikan dalam beberapa nama yang senantiasa berevolusi, mulai dari lahirnya tokoh kemajoean kemudian medekonstruksi menjadi bangsawan oesoel, kaoem muda hingga terciptanya kaoem atau pemuda terpelajar atau jong. Di mana kemunculan Intelegensia ini dilatarbelakangi oleh terjadinya revolusi etis Hindia Belanda akibat krisis ekonomi Liberal di Hindia Belanda. Selain itu juga ditandai dengan masuknya paham reformisme modernisme Islam yang berusaha mengimbangi arus sekulerisme Barat. Pada abad ke-20 belbagai pergulatannya dalam mencari pengakuan dan otoritas politik. Pada penghujung abad ke-20 hingga fajar abad ke-21 terjadi banyak perubahan rezim sistem baik ekonomi maupun politik dan kekuasaan yang silih berganti, masa ini juga diwarnai dengan krisis ekonomi dan terjadi era ekonomi yang kedua setelah reformasi etis Hindia Belanda. Maka, dapat dikatakan dengan keterlibatan secara aktif dan pertarungan memperebutkan kekuasaan kaum Intelegensia Islam Indonesia. Oleh karenanya pembentukan elit-politik dn birokrasi Indonesia senantias tidak bisa lepas dari perkembangan dan perubahan peta Intelegensia Islam Indonesia. Bahkan, pernah menjadi inti dari elit-politik Indonesia, mulai sejak diterapkannya Politik Etis Belanda hingga rezim pasca reformasi.

Kata Kunci: Intelegensia, Islam, Kelas Sosial

Abstract

Overview of the Indonesian Islamic Intelligence have ups and downs, both politically and intellectually. Indonesian Islamic Intelligence Transformation previously marginalized from the world of intellectual, political and bureaucratic Indonesia toward the central position is a picture of a long journey Intelligence Islam Indonesia. Emerging Intelligence Indonesia in the late 19th century until the first two decades of the 20th century, termanipulasikan in some names that always evolved, ranging from the birth figures medekonstruksi kemajoean later became nobles oesoel, young kaoem to create kaoem or educated youth or jong. Where the emergence of Intelligence is motivated by the ethical revolution of the Dutch East Indies as a result of the economic crisis Liberal in the Dutch East Indies. It also marked the entry of Islamic modernism reformism understand that trying to balance the flow of Western secularism. In the 20th century belbagai struggle in seeking recognition and political authority. At the end of the 20th century until the dawn of the 21st century there were many changes in the regime of both economic and political systems and power turns, this period was also marked by the economic crisis and economic occurred after the second era of ethical reform of the Dutch East Indies. Thus, it can be said with the active involvement and fight for control of the Intelligence Islam Indonesia. Therefore, the formation of political elite Indonesian bureaucracy senantias dn can not be separated from the developments and changes in Indonesian Islamic Intelligence maps. In fact, once the core of Indonesia's political elites, ranging from the Dutch Ethical Policy implementation to post-reform regime.

Keywords: Intelligence, Islam, Social Class

A. LATAR FILOSOFIS

Dalam pembahasan ini mengambil isitilah “*Inteligensia Islam*” berawal dari sejarah yang menjelaskan bahwa, Tjokroaminoto, Agus Salim dan Suryopranoto disebut sebagai generasi pertama Inteligensia Islam Indonesia (Latif, 2000: 32). Alasannya adalah dalam rentang waktu itu ada 3 (tiga) arus yang mempengaruhi lembaga pendidikan yang menjadi kanal bagi Islam Indonesia yaitu; Makkah, Pendidikan Barat, dan Kairo (Latif, 2000: 655-667). Kalau ditindaklanjuti lebih dalam, Tjokroaminoto sendiri adalah produk dari pendidikan Barat, yaitu OSVIA model pendidikan sekuler Belanda. Walaupun begitu, ia sebagai produk pendidikan Barat tetap berusaha mempertahankan identitas keislamannya. Van Neil menggambarkan Tjokroaminoto menjadi bagian kedua dari kepemimpinan Sarikat Islam (SI), yaitu golongan intelektual berpendidikan Barat yang kurang puas berada di dalam lingkungan struktur kolonial (VanNeil: 2009: 45). Ini yang menjadikannya sebagai integensia Islam (Latif: 2000: 44). Hal ini mendorong munculnya gugus integensia yang bersifat hibrida (persilangan) yang kelak akan melahirkan terbentuknya “intelekt ulama” (Inteligensia modern yang melek dalam pengetahuan keagamaan). (Latif, 2000: 107) Hal ini yang membedakan basis epitemik pemikiran Tjokroaminoto dengan tokoh sezamannya. Berbeda dengan kelompok pendidikan aliran Makkah yang terjawantahkan dalam kelompok tradisionalis Islam lulusan Pesantren, seperti KH Wahab Chasbullah, juga berbeda dengan aliran Kairo yang terwujud dalam kelompok reformis Islam seperti Ahmad Dahlan, KH

Mas Mansyur dan lain-lain. Apalagi dengan kelompok aliran pendidikan Barat yang sudah tercerabut identitas keislamannya seperti Sutomo, Tan Malaka, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Memang kalau ditinjau dari kelimuan para ulama yang belajar

di Timur Tengah (Kairo) dan Mekah sebagaimana ditelusuri oleh Bruinessen, kajian ulama yang belajar ke Arab dan Timur Tengah berkisar pada pembelajaran masalah tata bahasa Arab (*nahw dan saraf*), fiqh dan *ushul al-Fiqh* dan juga akidah atau *ushuluddin* serta pelajaran akhlak (Bruinessen: 1994: 145-169). Namun, di Indonesia sebagaimana yang dialami oleh Tjokroaminoto dan Salim kondisi sosialnya lebih kompleks dibanding di Timur Tengah. Sehingga dengan penguasaan Tjokroaminoto dan Salim akan Bahasa Inggris dan Belanda, mereka lebih peka untuk mendalami ilmu filsafat, politik, sosiologi, dan lain-lain yang tidak akan dipelajari di Timur Tengah. Di sini dapat melihat kekhasan pemikiran politik Tjokroaminoto. Pengetahuannya yang mendalam akan konsep sosialisme, nasionalisme dan demokrasi yang berasal dari Barat membentuk cakrawala pemikirannya yang kompleks. Walaupun ia berasal dari golongan priayi yang tidak banyak mengetahui tentang keislaman ia terus berproses dengan menginternalisasi dirinya sebagai seorang Muslim, dengan melakukan proses belajar yang tidak kenal henti dan pantang berubah.

A. PROFIL KEAGAMAAN, SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

Mohammad Hatta, dalam pidatonya yang bersejarah di hadapan sivitas akademika Universitas Indonesia pada tanggal 11 Juni 1957 yang berjudul “Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia” menafsirkan ‘inteligensia’ sebagai sinonim dengan ‘intelektual’. Selo Soemardjan pernah menulis ‘*The Changing Role of intellectuals in Indonesian National Development*’ (1981) untuk menjelaskan peran ‘inteligensia’. Dia berargumen: ‘... konsep intelektual yang dianggap atau menganggap diri sendiri sebagai intelektual harus diartikan identik dengan kata ‘inteligensia’ (Soemardjan, 1981: 139-140). Pada saat yang bersamaan, Arief Budiman (1981), menulis ‘*Students as Intelligensia: The Indonesian Experience*, dengan menggunakan

kerangka literatur Eropa Barat mengenai 'intelektual', dimana di dalamnya istilah 'intelektual' dan 'inteligensia' dipakai dengan saling dipertukarkan. Pada satu kesempatan, dia menyatakan bahwa para mahasiswa Indonesia termasuk ke dalam 'kelompok intelektual'. Pada kesempatan yang lain, Daniel melukiskan para mahasiswa sebagai inteligensia. Daniel Dhakidae (2003), menerbitkan bukunya mengenai para intelektual Indonesia sepanjang Orde Baru dengan judul *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Namun, dalam buku itu, dia tidak memberikan pembedaan yang jelas antara konsep 'intelektual' dan 'inteligensia'. Selain mengasosiasikan istilah 'inteligensia' dengan 'intelektual', dia menggunakan kasus 'inteligensia' Rusia sebagai contoh dari keberadaan 'intelektual'. Ambiguitas semacam itu bukan hanya tampak nyata dalam studi mengenai Indonesia, namun juga berlangsung umum dalam wacana ilmiah Barat. Menurut Aleksander Gella (1976), para ahli sosiologi Barat selama jangka waktu yang lama 'bahkan tidak melihat adanya perbedaan antara para intelektual di Barat dengan formasi sosial yang unik dari suatu stratum, yang disebut intelligentsia, mulai berkembang di Rusia dan Polandia sepanjang pertengahan abad ke sembilan belas'. Gella bahkan menunjukkan bahwa istilah 'inteligensia' tidak diberikan entri tersendiri baik dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* maupun dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Lebih dari itu, Gella mengamati bahwa dalam karya Robert Michels (1932) dan Edward Shils (1968), kedua istilah tersebut tidak dianggap sebagai dua konsep yang berbeda.

Di Indonesia, pada masa akhir kekuasaan Suharto, setelah sejak tahun 1960-an berlangsung proses demoralisasi yang melanda politisi Islam, berbagai figur inteligensia Islam secara mengejutkan memainkan peran sentral dalam wacana sosial-politik Indonesia. Hampir bersamaan, banyak anggota lain dari inteligensia Islam

yang berhasil menduduki eselon atas dalam birokrasi pemerintahan. Isu yang menyangkut sepak-terjang inteligensia Islam ini semakin mendapatkan liputan media yang luas, menyusul pendirian Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI) pada bulan Desember 1990. Setelah itu, ketika gerakan reformasi muncul pada 1997/1998, beberapa figur inteligensia Islam memainkan peran yang krusial dalam proses pengunduran diri Suharto. Signifikansi politik dari inteligensia Islam ini semakin nyata pada masa pemerintahan (transisi) Habibie, yaitu ketika para anggota kabinet dan pejabat senior birokrasi kebanyakan berasal dari para anggota ICMI. Saat yang bersamaan, kepemimpinan partai Golkar (yang merupakan penerus dari mesin politik Orde Baru) mulai didominasi oleh para mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Capaian politik inteligensia Islam ini memuncak dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pasca-Habibie, yang disusul dengan penunjukkan figur Islam sebagai pejabat senior negara. Meskipun inteligensia Islam pada akhir abad ke-20 telah mampu mencapai kredibilitas intelektual yang lebih kuat, selain menempati posisi politik dan birokratik yang lebih baik, partai politik Islam secara keseluruhan tidak kunjung memperoleh dukungan suara mayoritas. Pada Pemilihan Umum tahun 1998, jumlah suara yang diperoleh semua partai Islam, termasuk partai yang menjadikan Pancasila sebagai azasnya, hanya sebesar 36,38%, yang berarti hanya meraup 37,46% dari total kursi di DPR (yakni 173 kursi dari total 462 kursi yang ada). Lebih dari itu, saat posisi politik dan birokratik dari inteligensia Islam meningkat, sebagian besar dari para pemimpin senior Islam menjadi kurang terobsesi dengan klaim Islam. Sebagaimana telah terjadi pasca kemerdekaan, dimana kelompok Islam tidak lagi terlalu berobsesi dengan agenda pencantuman kembali 'Piagam Jakarta' dalam konstitusi negara. Gambaran mengenai inteligensia Islam pada akhir abad ke-20 ini kontras dengan gambaran pada awal abad

ke-20. Dimana, hanya sedikit dari lapisan berpendidikan terbaik dari inteligensia Indonesia yang bersedia bergabung dengan perhimpunan Islam, seperti Sarekat Islam (SI), karena sebagian besar lebih suka bergabung dengan organisasi yang memiliki kaitan dengan kaum priyayi seperti Budi Utomo. Namun, dengan keberhasilan membela dan memenangkan hati masyarakat terjajah di akar rumput, SI muncul sebagai perhimpunan Hindia Belanda pertama yang memiliki konstituen yang tersebar luas melintasi batas kepulauan Nusantara dan berhasil memiliki jumlah keanggotaan yang terbesar dibandingkan dengan perhimpunan yang ada pada masa itu. Sementara, pada akhir abad ke-20, banyak sekali lapisan terdidik terbaik dari masyarakat Indonesia yang bergabung dengan perhimpunan mahasiswa dan inteligensia Islam (seperti HMI, ICMI, dan KAMMI), serta juga partai Islam. Namun daya tarik Islam dalam politik di kalangan masyarakat akar rumput cenderung merosot. Meski pengaruh inteligensia Islam meningkat dan sikap politik inklusif di kalangan kaum Islam menguat, partai Islam dan identitas komunal masih juga bertahan. Bertahannya politik identitas Islam ini bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh lapisan tertentu dari inteligensia Islam, terutama di kalangan generasi muda, untuk berjuang demi diterapkannya Hukum Islam (syariah). Saat yang bersamaan, label Islam masih tetap dipakai secara luas sebagai nama bagi organisasi kaum terpelajar dan politik. Seiring dengan kemunculan partai Islam yang liberal maupun yang tidak liberal (*illiberal*), pertarungan ideologi dan identitas politik baik antar maupun intra tradisi intelektual yang ada terus berlangsung dengan agenda yang berbeda serta intensitas dan ekspresi yang beragam. Di sini, politik Islam mengalami fragmentasi internal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti ditunjukkan oleh kemunculan secara berlimpah partai politik Islam. Sepanjang era reformasi, bahkan inteligensia Islam yang

pernah bersatu dalam ICMI menjadi tercerai-berai ke dalam beragam orientasi partai. Semua gambaran tersebut mencerminkan adanya kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*changes*) dalam gerak perkembangan inteligensia Islam. Adanya gambaran diakronik dan sinkronik dari inteligensia Islam ini patut memperoleh perhatian yang serius dari kaum akademisi Inteligensia Indonesia. Untuk satu atau lebih alasan, tingginya keterlibatan politik dan keasyikan inteligensia Indonesia dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan masih tetap menjadi sebuah gambaran pokok dari dunia perpolitikan Indonesia. Maka, upaya untuk memahami kesinambungan dan perubahan yang berlangsung dalam gerak perkembangan inteligensia Indonesia merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan agar bisa memahami kesinambungan dan perubahan dalam pembentukan elit Indonesia dan politiknya. Lebih dari itu, transformasi inteligensia Islam dari posisi marginal menuju posisi sentral dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia tampak membingungkan jika berusaha memahaminya dalam konteks studi yang telah ada mengenai elit Indonesia modern dan politiknya. Geertz dalam karyanya yang berpengaruh, *The Religion of Java* (1960, 1976), menggambarkan bahwa elemen aristokratik dan birokratik (priyayi) dari masyarakat Jawa merupakan kalangan yang merepresentasikan pandang dunia pra-Islam. Dia bahkan cenderung melukiskan priyayi dan santri (elemen Islam yang taat) sebagai kategori yang bersifat saling berlawanan.

Di Indonesia formasi sosial tidak pernah menjadi basis utama bagi penyatuan sosial, kebanyakan intelektual berkelompok atas dasar solidaritas kultural ketimbang atas dasar kelas. Dalam situasi yang diskriminatif dan segregatif itu, upaya untuk menciptakan suatu elit berpendidikan modern dengan anutan nilai dan prinsip sekuler bisa melahirkan kecenderungan antitetis manakala para anggota komunitas inteligensia tersebut

menemukan jalan kembali ke jangkar identitasnya. Ketika para anggota dari komunitas inteligensia Indonesia mulai merumuskan suatu respons ideologis atas negara kolonial yang represif, pluralitas latar sosio-kultural mereka melahirkan perbedaan dalam ideologi. Sebagai konsekuensinya, para anggota komunitas inteligensia Indonesia terbelah ke dalam beberapa tradisi politik dan intelektual. Maka, lahir kelompok inteligensia Islam, inteligensia komunis, inteligensia nasionalis, inteligensia sosialis, inteligensia Kristen, dan seterusnya. Dalam konflik di antara tradisi intelektual ini, masing-masing kelompok berupaya untuk memperbanyak pengikutnya dengan jalan menggabungkan diri dengan kelompok status yang telah mapan (yaitu kelompok solidaritas kultural). Meski demikian, mereka tetap menunjukkan kesamaan dalam keistimewaan sosial (*social privilege*), bahasa, kebiasaan, latar pendidikan dan orientasi pekerjaan. Dengan kata lain, inteligensia Indonesia merefleksikan suatu ekspresi kolektif dalam arti 'suatu kesamaan identitas dalam perbedaan' (*identity in difference*) dan 'keberagaman dalam kebersamaan identitas' (*difference in identity*). Inteligensia Indonesia merupakan bagian dari dinamika kesejarahan Indonesia, dan oleh karena itu, formasi sosialnya juga tunduk kepada proses kesejarahan dan transformasi. Istilah pertama dalam bahasa Indonesia (Melayu) yang mengindikasikan lahirnya inteligensia Hindia Belanda adalah 'bangsawan pikiran' yang mulai muncul dalam ruang publik pada dekade pertama abad ke-20. Pada tahun 1960-an, istilah 'cendekiawan' (atau 'tjendekiawan' dalam ejaan lama) mulai memiliki konotasi politiknya bersinonim dengan konsep 'intelektual' atau 'inteligensia'. Ini terlihat dari berdirinya sebuah perhimpunan intelektual sayap kiri, Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) pada awal tahun 1965. Tidak lama kemudian, majalah perjuangan milik Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) cabang Bandung, yaitu Tjendekiawan Berjuang terbit pada

tahun 1966. Pada tahun 1970-an, istilah tersebut dipergunakan secara reguler dalam wacana publik Indonesia sebagai dampak dari kebijakan Orde Baru untuk menggantikan peristilahan dari Barat dengan peristilahan Indonesia.

Dalam konteks ini, kolektivitas dari orang-orang terdidik Islam dalam berbagai perhimpunan, organisasi kultural dan politik lebih dipahami sebagai kolektivitas dari 'inteligensia' ketimbang sebagai kolektivitas dari 'para intelektual'. Meski demikian, penting dicatat bahwa tidak ada kolektivitas tanpa para intelektual.

C. KONTRIBUSI DALAM BIDANG SOSIAL, POLITIK, PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

Teori ini membagi Islam menjadi dua bagian, *pertama*, Islam yang bersifat keagamaan, *kedua*, Islam yang bersifat politik. Sementara pemerintah kolonial harus menghormati dimensi dunia kehidupan Islam yang pertama, ia tidak boleh mentoleransi yang kedua. Untuk persoalan kedua ini, Snouck menekankan: 'karena itu, setiap ada tanda-tanda kemunculannya, harus secara tegas dihadapi dengan kekuatan dan semua campur tangan yang datang dari luar negeri dalam perkara Islam harus dipatahkan sejak dari tunasnya (Benda, 1958: 24).

Hasil dari sintesis ini ialah suatu hibrida 'reformisme-modernisme Islam'. Gerakan intelektual yang baru itu terinspirasi oleh ajaran dari seorang pemikir Islam pengelana yang terkemuka, Jamal al-Din al-Afghani (1839-97), yang menjadi perhatian utama dari pemikir ini ialah bagaimana mengatasi kelumpuhan dan perpecahan Islam yang terus terjadi dan menghidupkan kembali kejayaan Islam. Dalam pandangan al-Afghani, untuk membebaskan masyarakat Islam dari cengkeraman kolonial niscaya harus dilakukan pembaharuan terhadap kepercayaan dan praktik Islam karena agama baginya merupakan basis moral bagi kemajuan teknik dan saintifik serta solidaritas politik dan kekuasaan. al-Afghani yakin bahwa Islam pada

hakekatnya memang cocok untuk menjadi basis bagi masyarakat saintifik modern sebagaimana halnya pernah menjadi basis bagi kejayaan Islam di abad pertengahan. Di antara muridnya yang terkenal ialah, Muhammad Abduh (1849-1905). Dengan kitab utamanya *Al-Urwa al-Wuthqâ* (Ikatan Yang Kokoh), yang akan menjadi landasan bagi propaganda gerakan Pan-Islamisme. Sejak saat itu, gerakan Pan-Islamisme menjadi sebuah perwujudan dari apa yang dulu diimpikan al-Afghani sebagai solidaritas Islam. Di mata al-Afghani, Pan-Islamisme dan Nasionalisme bisa saling melengkapi dalam aspek 'pembebasan'.

Achmad Khatib, yang merupakan ulama besar koloni Jâwa yang terakhir di sekitar peralihan abad ke-19/20, bersikap skeptis terhadap meluasnya pengaruh reformisme-modernisme Islam yang terinspirasi oleh pemikiran Abduh itu. Meskipun dia sendiri telah terpengaruh oleh reformisme Islam, namun posisinya sebagai penjaga tradisi pengajaran Syafi'iyah membuatnya bersikap kritis terhadap gagasan Abduh mengenai ijtihad dan modernisme. Dengan begitu, Khatib berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan inovasi. Dalam posisi 'perantara' semacam itu, Khatib bertindak sebagai bidan bagi kelahiran generasi ulama dan intelektual reformis-modernis di masa depan, seperti Mohd. Tahir bin Djalaluddin, M. Djamil Djambek, Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah (Hadji Rasul), M. Thaib Umar, Achmad Dachlan, dan Agus Salim serta bagi lahirnya ulama konservatif-tradisionalis di masa depan seperti Syeikh Sulaiman al-Rasuli dan Hasjim Asy'ari.

Komposisi aliran Islam dalam Dewan Konstituante menunjukkan hasil keseluruhan yang sama. Karena Partai Nasionalis Islam (PNI) meraih persentase suara terbesar (22,3%), 98 pada 8 Maret 1956, Presiden Sukarno menunjuk pemimpin PNI, Ali Sastroamidjojo sebagai formatur. Dalam Kabinet Ali II ini, semua partai Islam besar memiliki wakilnya dalam kabinet. Namun,

kabinet ini gagal karena perseteruan ideologis dan personal yang sengit di tubuh kabinet serta perselisihan di tubuh Angkatan Darat yang menyulut pemberontakan daerah. Perdebatan sengit segera terjadi di DPR maupun Konstituante mengenai status Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Bagi kubu non-Islam, Piagam Jakarta hanya salah satu dari dokumen sejarah yang dihasilkan dalam perjalanan sejarah rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, Piagam Jakarta tidak bisa dan tidak boleh menjadi sebuah sumber hukum. Sebaliknya, bagi kubu Islam, Piagam Jakarta bukan hanya mempengaruhi Pembukaan UUD 1945, melainkan juga seluruh batang tubuh UUD 1945, sehingga tetap terus memiliki makna hukum dan bisa dipergunakan sebagai sebuah sumber hukum untuk menerapkan aturan Islam bagi umat Islam. Karena berlarutnya perdebatan mengenai status Piagam Jakarta, Sukarno pada akhirnya mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Dalam pembukaan Dekrit ini, dikatakan bahwa "Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian integral dari UUD 1945".

Seiring dengan pelonjakan jumlah pelajar Islam sekolah menengah dan tinggi, kepentingan khas kaum terpelajar tidak bisa dipuaskan oleh organisasi pemuda yang ada karena disebut terakhir ini juga beranggotakan pemuda kurang terpelajar. Untuk mengakomodasi kepentingan khas mahasiswa, dibentuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada awal 1947, sedangkan untuk pelajar sekolah menengah, dibentuk Pelajar Islam Indonesia (PII) pada akhir 1947. Pada mulanya, kemunculan organisasi ini ditentang oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia GPII dengan alasan bahwa mereka bisa mengacaukan persatuan pemuda Islam (Sitompul, 2002: 2). Namun, dalam perkembangannya, ketiga organisasi itu bisa hidup berdampingan. Pada Kongres Al-Islam yang diadakan di Solo (20-25 Oktober 1945),

para pemimpin Islam dari berbagai aliran mengakui GPII, HMI, dan PII berturut-turut sebagai satu-satunya perhimpunan pemuda Islam, mahasiswa Islam, dan pelajar Islam yang sah (Sitompul, 1976: 39). Perdebatan internal (Islam) dan peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa Islam dalam perkembangannya, merebakkan pertumbuhan berbagai organisasi pelajar dan mahasiswa Islam. Untuk menggambarkan perkembangan organisasi pelajar dan mahasiswa Islam ini sebagai lahan persemaian bagi kepemimpinan komunitas politik Islam pada masa depan, akan disoroti empat organisasi terpenting: HMI, PII, PMII, dan IMM. Selain perhimpunan pelajar dan mahasiswa, dipaparkan juga perhimpunan sarjana Islam yang pertama, yaitu Persami, yang mengakomodasi mantan anggota perhimpunan pelajar dan mahasiswa Islam tersebut. Kemunculan HMI didirikan oleh mahasiswa STI atas prakarsa Lafran Pane (lahir 1922) pada 5 Februari 1947. Lafran Pane adalah adik dua-tokoh sastra terkemuka Indonesia, Sanusi Pane dan Armijn Pane. Pane berlatar belakang Islam yang kuat, tetapi juga memiliki afiliasi yang beragam. Sebelum masuk STI, latar belakang pendidikan yang utama dari Pane ialah pesantren, HIS, MULO dan AMS Muhammadiyah. Pane juga pernah bersekolah di sekolah dasar nasionalis, seperti Taman Antara di Sipo rok dan Taman Siswa di Medan. Setelah meninggalkan AMS Muhammadiyah di Jakarta, dia masuk sekolah nasionalis, Taman Dewasa Raya. Sesaat sebelum pendudukan Jepang, Pane bergabung dengan organisasi kiri, Gerindo, tempat Pane bergaul dengan pemimpin komunis pada masa depan, D.N. Aidit. Selama pendudukan Jepang, Pane bergabung dengan gerakan bawah tanah kelompok Kaigun. Pane kembali ke lingkungan epistemik Islam selama masa revolusi kemerdekaan ketika belajar di STI/UII di Yogyakarta. Lewat pertemuannya dengan para pengajar STI seperti Abdul Kahar Muzakki, M. Rasjidi, Fathurrahman Kafrawi, Kasman Singodimedjo, dan Prawoto

Mangkusasmito, Pane terinspirasi untuk menghidupkan kembali identitas dan komitmen Islamnya (Sitompul, 2002: 45-47). Pertobatan batin ini memberinya dorongan psikologis untuk membentuk sebuah jaringan inteligensia muda Islam yang baru. Pane terilhami oleh hasrat intelektual Islam generasi tua dalam mendirikan organisasi mahasiswa Islam seperti JIB dan SIS di masa lalu akan berfungsi sebagai lahan persemaian bagi para pemimpin Islam masa depan. Alasan lainnya ialah kegagalan organisasi mahasiswa lokal yang ada, seperti Persjarkatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY, berdiri 1946) dan Sarikat Mahasiswa Indonesia Solo (SMI berdiri 1946) untuk memenuhi aspirasi mahasiswa Islam. Dalam kompetisinya dengan organisasi mahasiswa sekuler untuk menarik para anggota, HMI meniru JIB dan SIS dalam kerangka islamisasi kaum terpelajar melalui modernisasi institusi-institusi Islam. Namun, berbeda dengan generasi Islam terdahulu, generasi Pane merupakan generasi-ketiga inteligensia, yang juga anak kandung revolusi kemerdekaan cenderung lebih “nasionalistik” dan inklusif dalam orientasi politiknya. Babak awal perkembangan pesat ini sebenarnya telah dimulai pada awal 1950-an ketika para mahasiswa dari beberapa universitas sekuler yang prestisius seperti M. Imaduddin Abdul rahim (lahir 1931) dari UI cabang Bandung (ITB), Ismail Hasan Metareum (lahir 1929), dan Bintoro Tjokroamidjojo (lahir tahun 1931) dari UI cabang Jakarta bergabung dengan HMI. Pada akhir 1950-an, di antara anggota baru HMI yang terkenal ialah Sulastomo (lahir 1938) dari UI dan Endang Saifuddin Anshari (lahir 1938) dari Universitas Padjajaran. Merespon peningkatan jumlah anggota, HMI mulai mengadakan latihan kader yang sistematis pada 1959. Karena kelangkaan literatur mengenai ideologi Islam dalam bahasa Indonesia, program latihan kader itu menggunakan buku karya Tjokroaminoto tahun 1920-an berjudul *Islam dan Sosialisme* sebagai referensi utama. Pada awal 1960-an, sejumlah besar mahasiswa yang berlatar

belakang santri mulai berbondong-bondong masuk universitas, termasuk para tokoh HMI yang terkenal, seperti Nurcholish Madjid (lahir 1939) dari IAIN Jakarta; Djohan Effendi (tahun 1939) dari IAIN Yogyakarta; M. Dawam Rahardjo (lahir 1942), Ahmad Wahib (lahir 1942), dan M. Amien Rais (lahir 1944) dari UGM; Fahmi Idris (lahir 1940) dan Ridwan Saidi (lahir 1942) dari UI; Adi Sasono (lahir 1943) dari ITB; Ahmad M. Saefuddin (lahir 1940) dari IPB; dan Sugeng Sarjadi (lahir 1942) dari Universitas Padjadjaran. Jadi, ketika Demokrasi Terpimpin mencapai titik puncak pada pertengahan 1960-an, HMI telah menjadi organisasi mahasiswa terbesar di negeri ini. Jumlah anggotanya pada akhir 1960-an dilaporkan lebih dari 100.000. Setahun setelah pendirian IPNU, dibentuk Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU). Kedua organisasi baru ini didesain untuk memperkuat kerja sama antara para pelajar dan mahasiswa NU yang ada di sekolah modern maupun pesantren sebagai sumber pembentukan inteligensia tradisional (Wahid, 2000: 30-31). Lebih jauh lagi, karena jumlah mahasiswa tradisional meningkat dalam paruh kedua 1950-an, ditempuh upaya untuk membentuk sebuah organisasi mahasiswa tersendiri bagi para mahasiswa tradisional. Pada Desember 1955, para mahasiswa tradisional di Jakarta dipimpin oleh Wail Haris Sugiarto mendirikan Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU). Pada tahun yang sama, para mahasiswa tradisional di Surakarta dipimpin oleh Mustahal Ahmad dari Universitas Tjokroaminoto (berdiri 1955) mendirikan Keluarga Mahasiswa NU (KMNU), yang menyerupai nama organisasi pelajar NU yang telah ada di Timur Tengah. Namun, para pemimpin IPNU menganggap eksperimen awal ini bersifat prematur karena jumlah mahasiswa tradisional masih terbatas dan keberadaan organisasi semacam itu masih bersifat lokal dan terpencar-pencar (Wahid, 2000: 33-34). Jumlah mahasiswa tradisional meningkat pesat pada akhir 1950-an,

terutama setelah pendirian perguruan tinggi agama. Di luar IAIN, pada 1958 NU mendirikan sendiri sebuah perguruan tinggi Islam, yaitu Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama di Solo, meskipun hanya memiliki satu fakultas, yaitu syariah. Dalam hal keterbukaannya terhadap rasionalisme, teknologi dan pendidikan modern, para mahasiswa NU ini sama modernnya dengan para mahasiswa Muhammadiyah, sehingga pada kurun waktu tersebut NU telah memiliki lapisan inteligensia tersendiri. Namun, inteligensia NU ini berbeda dalam orientasi teologisnya dengan inteligensia Muhammadiyah. Sementara intelektual Muhammadiyah terpanggil dengan ajaran pembaruan yang mengidealkan pemurnian agama, intelektual NU masih mempertahankan cara pandang konservatif. Istilah "konservatif". Jadi, akan lebih tepat jika intelektual NU ini disebut dengan inteligensia "konservatif-modernis" daripada sebagai "kaum tradisional". Peningkatan jumlah mahasiswa tradisional, yang dibarengi dengan penguatan afinitas HMI dengan Masyumi, telah melahirkan konflik tajam dalam dunia politik mahasiswa. Hal ini kemudian memotivasi para pemimpin IPNU untuk membangun organisasi khusus bagi mahasiswa tradisional. Kongres Nasional IPNU di Kaliurang (Yogyakarta) pada 14-16 Maret 1960 menunjuk tiga belas anggota IPNU untuk membentuk organisasi yang diinginkan itu. Hal ini pada akhirnya melahirkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 17 April 1960 dengan Mahbub Djunaedi (lahir 1933) sebagai ketua pertama, Chalid Mawardi (lahir 1936) sebagai wakil ketua, dan Said Budairy sebagai sekretaris jenderal. Jumlah anggotanya pada akhir 1960-an hanya beberapa ribu, yang sebagian besar mahasiswa IAIN. Kemunculan PMII mengundang skeptisisme dan sinisme, baik dari ulama konservatif maupun HMI. Ulama konservatif NU terutama lebih mempersoalkan pelanggaran syariah karena tidak ada pemisahan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam keanggotaan PMII.

Bagi HMI, pendirian PMII merupakan pengkhianatan terhadap umat Islam yang telah bersepakat pada 1949 untuk mengakui PII dan HMI sebagai satu-satunya organisasi pelajar dan mahasiswa Islam. Sejak saat itu, kalangan tradisionalis dalam tubuh HMI terisolasi. Para tokoh tradisionalis dalam HMI, seperti Mahbub Djunaedi (wakil ketua HMI pada saat kemunculan PMII), Fahrur Rozi, dan Darto Wahhab dituduh sebagai otak gerakan "separatis" itu dan kemudian dikeluarkan dari HMI (Wahid, 2000: 42-43). Setelah itu, para mahasiswa tradisionalis mendukung PMII, meski sebagian dari mereka tetap bergabung dengan HMI atau memiliki keanggotaan ganda. Anak-anak ulama dan pemuka agama dari kalangan tradisionalis cenderung bergabung dengan PMII, sedangkan anak-anak "orang biasa" dari kalangan tradisionalis cenderung bergabung dengan HMI. Sementara para mahasiswa NU menganggap HMI didominasi oleh mahasiswa reformis-modernis, para pengikut Muhammadiyah menganggap HMI kurang memiliki komitmen terhadap ideologi reformisme, maka muncul Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Sekolah agama yang diatur oleh menteri agama meliputi Madrasah Ibtidaiyah (sekolah dasar), Madrasah Tsanawiyah (sekolah menengah pertama) dan Madrasah Aliyah (sekolah menengah atas). Statistik tahun 1954 menunjukkan bahwa pada saat itu, pemerintah memberikan subsidi pada lebih dari 13.000 Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan 16 Sekolah Menengah Atas (Boland, 1971: 117). IAIN lain yang berdiri pada tahun 1960-an ialah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (berdiri tahun 1963), IAIN Ar-Raniry Aceh (berdiri tahun 1963), IAIN Raden Patah Palembang (berdiri tahun 1964), IAIN Antasari Banjarmasin (berdiri tahun 1964), IAIN Alauddin Makassar (berdiri tahun 1965), IAIN Sunan Ampel Surabaya (berdiri tahun 1965), IAIN Imam Bonjol Padang (berdiri tahun 1966), IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (berdiri tahun 1967), IAIN Sunan Gunung Jati Bandung

(berdiri tahun 1968), dan IAIN Raden Intan Tanjung Karang (berdiri tahun 1968). Pada tahun 1995, terdapat sekitar 14 IAIN di seluruh Indonesia dengan total mahasiswanya sebanyak 86.198.

Sejak bulan Agustus 1959, usaha pemerintah untuk menghambat laju inflasi memunculkan kebijakan mendevaluasi rupiah sebesar 75 persen. Dengan kebijakan itu, semua uang pecahan Rp. 500 dan Rp. 1.000 dipotong nilainya sehingga menjadi sepersepuluhnya, sehingga menurunkan suplai uang dari Rp. 34 miliar menjadi Rp. 21 miliar. Sektor ekonomi riil sangat terpukul oleh keputusan ini, dan pemerintah pun terpaksa membolehkan ekspansi kredit. Sebagai akibatnya, dalam waktu enam bulan, suplai uang kembali ke tingkat yang semula dan inflasi kembali merayap naik. Sejak akhir 1961 sampai 1964, Indonesia mengalami hiper-inflasi yang terus-menerus (sekitar 100 persen per tahunnya). Pada awal 1965, inflasi ini meningkat tajam yang membuat berbagai harga membumbung sampai 500 persen. Hal ini semakin diperburuk karena program ekonomi dari pembangunan delapan tahun, yang telah ditetapkan pada akhir 1960, ditetapkan secara agak tragis sekaligus menggelikan. "Program itu merupakan bualan yang sudah lazim dan tragis karena rencana ekonomi tersebut dibagi-bagi menjadi 17 bagian, 8 jilid, dan 1945 pasal yang melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan" (Ricklefs, 1993: 267, 280). Karena lapangan kerja baru setiap tahunnya merosot, sementara jumlah lulusan yang ada begitu besar, muncul problem seberapa selektifnya universitas seharusnya menerima dan meluluskan mahasiswa. Problem "proletarianisasi" ini disebabkan oleh adanya sikap umum dari kalangan kaum terdidik Indonesia pada masa itu: yaitu, lebih suka bekerja sebagai pegawai kantor. L.W Mauldin misalnya mencatat bahwa dari 1.200 mahasiswa di Sekolah Pertanian Bogor yang menjadi cabang dari Universitas Indonesia pada tahun 1957, hanya satu yang punya

keinginan menjadi petani. Sementara yang lainnya lebih mencita-citakan menjadi pegawai negeri karena menjadi pegawai negeri dianggap paling dekat dengan tradisi priayi yang santai. Meningkatnya persaingan antara Cina dan Amerika untuk mengontrol wilayah Asia Tenggara telah memengaruhi urusan dalam negeri. Pada bulan November 1964, para pemimpin Cina telah menyarankan kepada Sukarno untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh tani bersenjata yang direkrut dari organisasi massa PKI. Saran ini sejajar dengan gagasan Sukarno untuk menasakomisasi Angkatan Darat. Pada saat yang bersamaan, harapan Amerika untuk bisa menghentikan ayunan bandul ke arah kiri di Indonesia melahirkan usaha untuk berkolaborasi dengan pihak Angkatan Darat (Sundhaussen, 1982: 193).

Pendidikan secara massal dan devaluasi inteligensia proyek modernisasi Orde Baru meniscayakan pembangunan dalam bidang pendidikan. Maka, meskipun menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kritik intelektual, rezim ini bersikap aktif dalam memajukan bidang pendidikan. Sejak Repelita II (1974/1975-1978-1979) sampai dengan Repelita IV (1984/1985, 1988/1989), anggaran pendidikan di Indonesia terus-menerus mengalami kenaikan, meskipun rata-rata persentasenya dari GNP selama periode tersebut (yaitu sebesar 2,5%), selalu lebih rendah di banding figur yang sama di negara-negara tetangga, seperti Malaysia (4,2%) dan Singapura (3,0%). Sebagai hasilnya, profil pendidikan Indonesia selama tahun 1980-an sangat berbeda dari profil pendidikan pada tahun 1960-an. Ini bisa dilihat dari angka komparatif jumlah siswa (sekolah-sekolah negeri dan swasta) yang berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama periode 1965-1990, total siswa yang belajar di sekolah dasar meningkat dari 11.577.943 menjadi 26.348.376. Sementara jumlah siswa sekolah menengah pertama meningkat dari 1.052.007 menjadi 5.686.118. Jumlah siswa sekolah menengah

atas meningkat dari 412.607 menjadi 3.900.667 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 72). Sedangkan jumlah mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi (termasuk program sarjana dan diploma) meningkat dari 278.0009 (Thomas, 1973: 13, 173) menjadi 1.590.593 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1997: 73). Sejak tahun 1984, pemerintah menerapkan kebijakan wajib Developmentalisme-Represif Orde Baru dan Respons Intelektual Islam belajar selama enam tahun secara nasional. Akibatnya, pada awal tahun 1990-an, keikutsertaan dalam pendidikan dasar merupakan fenomena yang universal. Atas prestasi ini, pada tahun 1993 Indonesia meraih Avicenna Award dari UNESCO. Peningkatan jumlah siswa ini akan segera juga berlangsung di tingkatan sekolah menengah (pertama), terutama setelah pemberlakuan kebijakan wajib belajar sembilan tahun pada tahun 1994. Jumlah siswa pada level pendidikan yang lebih tinggi masih tetap kecil, namun juga mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, berdasarkan kelompok usia, meningkat dari 1% pada tahun 1965 menjadi 7% pada tahun 1986. Peningkatan ini bahkan berlangsung secara lebih nyata setelah jumlah perguruan tinggi yang ada semakin banyak, terutama untuk perguruan tinggi swasta sejak tahun 1990. Pada tahun 1960, hanya ada 135 lembaga perguruan tinggi (negeri dan swasta) di Indonesia. Pada tahun 1991, jumlah itu menjadi 921, yang terdiri atas 872 perguruan tinggi swasta dan 49 perguruan tinggi negeri (Oey-Gardiner dan Suryatini 1990). Selain dari perkembangan yang bersifat kuantitatif ini, sentimen anti-komunis dari rezim Orde Baru mendorongnya untuk mendukung pendidikan agama di sekolah umum dan di universitas. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPRS) Nomor II/1967, para siswa wajib mengikuti pelajaran agama di sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi, meskipun pemerintah berusaha untuk

menjauhkan Islam dari kehidupan publik, namun sesungguhnya Orde Baru juga berperan dalam proses Islamisasi dunia akademis. Sekolah di bawah tanggung jawab Departemen Agama juga mengalami kecenderungan kemajuan yang sama. Jumlah total siswa di madrasah pada semua level, baik negeri maupun swasta, meningkat dari 2.745.58911 pada tahun 1965 menjadi 4.577.52312 pada tahun 1990/1991; Dhofier, 2000: 98). Dalam bidang kurikulum, pada tahun 1990-an terjadi perubahan yang radikal dalam kurikulum madrasah. Pada saat itu, siswa madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dianggap sebagai bagian dari sistem wajib belajar, sementara siswa madrasah 'alimah dianggap memiliki status yang sama dengan sekolah menengah atas sehingga bisa masuk universitas negeri. Dengan kebijakan ini, pengajaran di madrasah menjadi lebih menekankan pada pelajaran umum (sains). Pada level perguruan tinggi, kebijakan akomodasi dan promodernisasi dari Departemen Agama sejak masa kepemimpinan Mukti Ali (1973-1978) berperan dalam mengembangkan pelajaran umum di IAIN. Hal ini, didukung dengan penekanan kurikulum madrasah pada pelajaran umum (sains), mendesak IAIN, sebagai produsen utama guru-guru madrasah, untuk mengakomodasi lebih banyak lagi mata kuliah umum (sains) dan bahkan membuka fakultas umum (sains). Bersamaan dengan perkembangan ini, jumlah IAIN berlipat dari hanya satu pada tahun 1960 (yaitu IAIN Yogyakarta dengan cabangnya di Jakarta) menjadi empatbelas pada tahun 1990an. Total mahasiswa IAIN meningkat dari 19.781 pada tahun 1970 menjadi 84.037 pada tahun 1990 (Dhofier, 2000: 93-94). Pertumbuhan jumlah kaum terdidik ini ternyata melampaui jumlah pertambahan lapangan kerja yang tersedia di sektor publik. Untung pertumbuhan sektor swasta yang menawarkan gaji dan insentif lain yang lebih menggiurkan membuat mentalitas 'priyayi' dari para lulusan pendidikan tinggi itu seperti

tercermin dari preferensi mereka untuk berkerja Developmentalisme-Represif Orde Baru dan Respons Intelektual Islam sebagai pegawai negeri mulai berubah. Sejak pertengahan tahun 1980-an, para lulusan universitas cenderung lebih menyukai bekerja di sektor swasta, dan kebanggaan menjadi pegawai negeri pun mulai merosot. Sejak akhir 1980-an, terdapat arus masuk yang besar dari inteligensia itu ke dalam sektor swasta, lebih besar daripada yang pernah ada di masa lalu. Meskipun demikian, jumlah lapangan kerja yang disediakan oleh sektor swasta pun terbatas. Pada tahun 1985, 9% dari lulusan universitas tidak bisa diserap oleh lapangan kerja. Persentase ini terus meningkat dalam tahun berikutnya. Ancaman pengangguran kaum terdidik dialami paling serius oleh para mahasiswa ilmu sosial dan humaniora, karena lebih dari 70% dari mahasiswa sampai awal tahun 1990-an mengambil studi dalam disiplin ilmu tersebut (Latif 1994: 60). Situasi yang lebih buruk dialami oleh para mahasiswa IAIN yang lapangan kerjanya tradisional terbatas terutama di lingkungan Departemen Agama. Sudah sejak tahun 1980-an, Departemen ini tidak lagi sanggup menyerap besarnya lulusan IAIN. Situasi ini memuncak pada tahun 1993 ketika Departemen Agama mulai menerapkan kebijakan 'pertumbuhan nol' (*zero growth*), sementara pada saat yang bersamaan jumlah lulusan IAIN telah mencapai 11.299 (Dhofier, 2000: 96). Banyak lulusan IAIN yang kemudian menjadi guru di sekolah swasta Islam. Namun bagaimanapun, daya serap madrasah swasta dan pesantren juga terbatas. Menghadapi kenyataan itu, para mahasiswa IAIN terpaksa harus menemukan alternatif pekerjaan di luar sektor tradisionalnya. Tekanan ini tentu saja bisa mempengaruhi sikap dan pandangan keagamaan. Pada saat begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi tidak bisa diserap oleh lapangan kerja, prestise sosial sebagai inteligensia secara umum mulai merosot. Bahkan para mahasiswa, yang sejak masa kolonial dianggap sebagai bagian dari

intelektual Indonesia, mulai kehilangan statusnya sebagai intelektual *ex officio*. Sehingga sejak masa itu, orang-orang Indonesia cenderung mengasosiasikan istilah intelektual dengan orang-orang yang bergelut dengan dunia ide-ide (*people of ideas*), terutama yang memegang gelar sarjana. Pertumbuhan eksponensial mahasiswa Islam sejak tahun 1960-an menghasilkan ledakan jumlah sarjana Islam pada tahun 1970-an. Para sarjana ini memproyeksikan dirinya sebagai orang-orang bergelar yang mengharapkan peran publik yang berarti. Namun saat jalur karir mereka sebagai pemimpin maupun anggota partai Islam terhambat oleh adanya represi negara terhadap Islam politik, dimana harus mencari jalur alternatif untuk menyalurkan kebutuhan akan aktualisasi diri. Tantangan ini mempengaruhi bentuk ekspresi dan interpretasi politiko-religius atas Islam. Hal ini pada gilirannya membawa pada terjadinya perselisihan internal di dalam tubuh komunitas intelektual Islam. Akhirnya, ambisi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan teknokratik Barat dengan tujuan untuk mengejar kemajuan teknologi dan industri modern menumbuhkan dorongan kuat di kalangan para sarjana Indonesia, baik yang berasal dari perguruan tinggi sekuler maupun agama, untuk melanjutkan pendidikan ke pusat belajar di Barat. Selain beasiswa internasional, lembaga pemerintahan Indonesia seperti Bappenas dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi (terutama di bawah kepemimpinan menteri B.J. Habibie sejak tahun 1978 dan seterusnya) lewat kemitraannya dengan para donor internasional atau dana pinjaman lunak dari organisasi Developmentalisme-Represif Orde Baru dan Respons Intelektual Islam organisasi keuangan internasional sanggup menyediakan sendiri beasiswa bagi yang akan belajar ke luar negeri. Karena pertumbuhan sarjana Islam yang terus meningkat sejak akhir tahun 1960-an, banyak intelektual Islam yang mendapatkan berkah dari tersedianya

beasiswa ini. Keadaan ini turut memberikan sumbangan terhadap meningkatnya jumlah intelektual Islam yang memiliki keinginan untuk belajar.

B. DISKURSUS KELAS INTEGENSIA PASCA REFORMASI

Dalam membangun paradigma pembaruan Islam Pasca Reformasi di Indonesia ada beberapa langkah praktis yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi awal dari pengembangan paradigma di masa depan, diantaranya adalah: *Pertama*, Mendekonstruksikan Paradigma Pembaruan terdahulu, terutama pembaruan dimasa Orde Baru oleh kalangan neo-modernis dan neo-fundamentalis, dilakukan dengan memahami paradigma yang diterapkannya, kemudian dianalisa kembali relevansinya, memahami dimana keutamaan dan kelemahannya. Revolusi akan terjadi jika paradigma lama yang dipengaruhi oleh berbagai situasi kondisi sosial-intelektual tertentu mengalami krisis karena tidak mampu memberikan solusi. *Kedua*, Memahami Paradigma Islam Klasik, Paradigma Rasulullah, Shahabat dan Salaf. Memahami makna pembaruan sebagaimana yang diajarkan Al-qur'an dan Sunnah serta paradigma yang telah mereka terapkan dalam pembaruan pemikiran. Tidak mungkin dapat dilakukan pembaruan tanpa memahami semua paradigma yang telah dikembangkan oleh para generasi Islam terbaik dengan warisan intelektualnya. Untuk itu, mereka yang akan menggerakkan roda pembaharuan pemikiran diwajibkan untuk memahami paradigma Islam klasik dengan segala karakteristiknya. Karena pembaharuan Islam, kapan dan dimanapun bersumber pada paradigma yang telah dikembangkan oleh pelopor Islam terdahulu. Kegagalan memahami khazanah intelektual klasik Islam akan mengantarkan

para pembaru dalam kebingungan demi kebingungan dalam memahami makna ajaran Islam yang sebenarnya. Islam hanya dapat difahami dengan benar dan selamat dari sumber aslinya dan melalui orang-orang beriman yang meyakinkannya, mengamalkan dengan ikhlas dan memperjuangkan eksistensinya, dan bukannya melalui mereka yang hanya mengkaji dan menganalisisnya sebagai obyek ilmiah sebagaimana dilakukan para orientalis dan musuh Islam yang tidak dapat mendapatkan hidayah dengan pengetahuannya. Kaum muslimin tidak dilarang mempelajari agamanya dari orang yang tidak meyakinkannya, namun hal ini akan hanya mengantarkannya kepada pemahaman Islam belaka dan tidak dapat menghantarkannya menuju hidayah Allah. Sementara kaum muslimin diperintahkan untuk mempelajari Islam agar dapat menjadi hidayah dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, Mendamaikan Paradigma neo-Modernis dengan neo-Fundamentalis dengan mencari titik temu antara paradigma pembaruan dengan paradigma dasar sangat diperlukan, karena masing-masing aliran pemikiran memiliki keutamaannya masing-masing. Di-harapkan dengan ada titik temu diantara paradigma pembaruan akan menjadi fondasi dalam pengembangan pembaruan selanjutnya. Setiap paradigma pembaruan pasti mengandung unsur-unsur positif yang akan dapat dijadikan sebagai landasan pengembangan paradigma sesudahnya. Bahkan sebuah pembaruan, pada hakikatnya adalah mata rantai yang tidak terpisahkan dengan pembaruan sebelumnya. Itu sebabnya apatis dan phobia terhadap paradigma pembaruan, apapun bentuknya akan merugikan proses pembaruan itu sendiri. Demikian pula halnya, paradigma pembaruan yang dominan di Indonesia,

terutama aliran neo-modernisme dan neo-fundamentalisme pasti memiliki keutamaan masing-masing dalam mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita mulianya. Jadi musyawarah diantara kedua aliran besar pemikiran ini perlu dikembangkan dari waktu ke waktu, dengan keikhlasan dan ke-sungguhan para pelopornya, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk terbaik bagi mereka. Generasi muda Islam dapat menjadi jembatan dalam proses musyawarah dan mencari titik temu aliran pemikiran ini. Keikhlasan dan kesungguhan mereka mencari yang terbaik bagi bangsa ini dapat dijadikan pendorong utama proses mulia ini. Generasi muda Islam, terutama mereka yang memiliki kelayakan dan keseriusan serta komitmen dapat dijadikan sebagai kelompok katalisator yang akan menghubungkan aliran pemikiran yang berkembang, bahkan mereka lebih jauh diharapkan sebagai pelopor pengembangan paradigma pembaruan Islam masa depan yang akan membentuk aliran pemikiran tersendiri dengan paradigmanya, sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman yang mereka hadapi. *Keempat*, Mengembangkan Paradigma Baru "Manhaj Indonesia Pasca Reformasi". Pemahaman ini tidak menolak keuniversalan ajaran Islam yang diturunkan untuk seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun, namun paradigma pemahaman Islam adalah cerminan pemahaman masyarakat yang telah berinteraksi dengan ajaran Islam yang telah melahirkan tradisi Islam. Tradisi Islam Arab berbeda dengan tradisi Islam di Iran, Pakistan dan juga di Indonesia, walaupun keislaman mereka tetap satu. Keuniversalan Islam telah membentuk beraneka ragam khazanah tradisi sebagai sunnatullah keberagaman umat manusia yang merupakan keunggulan ajaran Islam dibandingkan ajaran lainnya yang tidak mampu berinteraksi dengan sebuah tradisi.

Namun ini tidak berarti bahwa Islam harus menyesuaikan diri dengan segala bentuk tradisi sebuah masyarakat, namun sebaliknya, tradisi masyarakat yang menyesuaikan diri dengan Islam dalam proses "Islamisasi Tradisi" yang telah dijalankan oleh para pendakwah Islam awal. Paradigma pembaruan Islam "manhaj Indonesia" mungkin berbeda dengan paradigma pembaruan di Timur Tengah, Iran, Turki dan lainnya. Karena manhaj ini dibangun berdasarkan keuniversalan Islam sesuai dengan tingkatan, tuntutan, dinamika, sejarah, tradisi dan keadaan masyarakat Islam Indonesia. *Kelima*, Memahami masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dan memahami dinamika sejarah masyarakat Indonesia, *Keenam*, Memahami cita-cita Indonesia baru, *Ketujuh*, Menumbuhkan semangat saling memahami cita-cita, *Kedelapan*, Memahami Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sumber keadilan, kebebasandan toleransi serta solusi kepada nestapa manusia modern, *Kesembilan*, Membangun citra Islam yang kaffah dan berdimensi Indonesia, *Kesepuluh*, Membangun model sebuah masyarakat madani. *Kesebelas*, Fokus perhatian bukan hanya kepada cendekiawan, akan tetapi juga kepada intelektual muda NU, pergerakan tarbiyah yang begitu gencar, *Keduabelas*, Melakukan penyatuan dengan gerakan intelektual Islam dibidang Tarekat. *Ketigabelas*, Menghimpun para intelektual 'independen' yang mungkin tidak bergabung dengan gerakan mahasiswa dan intelektual muslim manapun, *Keempatbelas*, Menelusuri gerak perkembangan dari para intelektual perempuan, *Kelimabelas*, Membahas gerak perkembangan tradisi lain dari inteligensia Indonesia dan interaksinya dengan inteligensia Islam, Dengan acuan ini diharapkan lahir sebuah paradigma pembaruan Islam di Indonesia yang sesuai dengan tuntutan reformasi dan dapat mengantarkan masyarakat menuju Indonesia

baru yang adil dan beradab serta dirahmati Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Budiman. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bruinessen, Martin van dan Julia Day Howell (ed). *Urban Sufism*. Jakarta: Mizan, 1994.
- Clifford, Geertz. *The Religion of Java. USA*: Chicago, 1955.
- Daniel, Dhakidae. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Harry Jundrich, Benda. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague: TP, 1958.
- Martin Van, Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Robert, van Neil. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustidaka Jaya, 2009.
- Selo, Soemardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu, 1981.
- Solichin. *HMI Candardimuka Mahasiswa*. Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation, 2010.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Yudi, Latif. *Inteligensia Islam dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Islam Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.
- _____, *Genealogi Inteligensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia abad XX*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Vedi R. Hadiz dan Daniel, Dhakidae, eds. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox dan ISEAS, 2005

